



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evita Manthovani

Jabatan : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Susiwijono

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Susiwijono

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan
Kerja Sama

Evita Manthovani

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	1.1	Nilai AKIP	74,5
		1.2	Indeks Kualitas Kebijakan	92
		1.3	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	1,7
		1.4	Indeks Perencanaan	96
		1.5	Capaian Prioritas Nasional	100%
		1.6	Capaian Indikator Kinerja Utama	100%
		1.7	Nilai Kinerja Anggaran	91
2.	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	2.1	Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular	80%
		2.2	Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	80%
3.	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif	3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti	90%
4.	Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerjasama yang berkualitas	4.1	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja	100%
		4.2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	100%
		4.3	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	100%
		4.4	Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan	100%
		4.5	Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	100%
5.	Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	92%
		6.2	Nilai AKIP Sekretariat	79,5

Program : Dukungan Manajemen

Kegiatan

1. Layanan Kegiatan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Anggaran

Rp. 14,387,149,000,-

Total

Rp. 14,387,149,000,-

Terbilang (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Pihak kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,

Pt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan
Kerja Sama

Susiwijono

Evita Manthovani

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Nilai AKIP Kementerian	74,5	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>Critical Success Factor</i> dalam perencanaan kinerja Penguatan ketaatan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi temuan serta rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu dan pemetaan perbaikan di tahun berjalan <i>Coaching</i> penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU Reviu penerapan <i>Critical Success Factor</i> dalam usulan PK, Renaksi, dan Manual IKU Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2026 Pelaporan ESR Kemenpan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Penyusunan draft Revisi Permenko No.19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring capaian NKO unit kerja TW I Monev dokumen pengukuran dan pelaporan pada laporan triwulanan I unit kerja Reviu dokumen laporan kinerja unit kerja triwulanan I Pelaksanaan Evaluasi AKIP tingkat Eselon I oleh Inspektorat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Pemenuhan bukti dukung di ESR Kemenpan Finalisasi Permenko No.19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring capaian NKO unit kerja TW II Monev dokumen pengukuran dan pelaporan pada laporan triwulanan II unit kerja Reviu dokumen laporan kinerja unit kerja triwulanan II Pemenuhan Bukti Dukung evaluasi AKIP Pelaksanaan evaluasi AKIP tingkat kementerian oleh Kemenpan RB Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring capaian NKO unit kerja TW III melalui reviu laporan triwulan kinerja Monev dokumen pengukuran dan pelaporan pada laporan triwulanan III unit kerja Reviu dokumen laporan kinerja unit kerja triwulanan III <i>Coaching clinic</i> persiapan penyusunan LAKIP 2025 unit kerja dan kementerian Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV
		Indeks Kualitas Kebijakan	92	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi peraturan atau kebijakan sebagai objek pengukuran pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan atau relevansi bukti dukung. 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan peraturan/kebijakan untuk objek penilaian tahun 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Indeks Kualitas Kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Proses Penilaian Mandiri (<i>pemilihan kebijakan, pengumpulan bukti dukung, pengisian input hasil self assessment ke sistem IKK</i>). Proses umpan balik dan perbaikan serta penyempumaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian hasil penilaian akhir IKK.
		Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	1,7	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan implementasi Pemerintahan Digital (PEMDI) yang meliputi penguatan aspek tata kelola dan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan penyesuaian indikator antara instrumen penilaian Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) dengan indikator SPBE Menyusun daftar identifikasi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan integrasi dan interoperabilitas sistem dan layanan, serta peningkatan kapasitas SDM digital meliputi aspek SDM Pemerintah Digital dan SDM Aspek Data. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah terintegrasi melalui diskusi dan menggali masukan dengan pengguna layanan terkait kelemahan aplikasi, celah keamanan, penambahan fitur dan model integrasi sebagai masukan peningkatan kualitas layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas SDM digital pada aspek Kemanan Siber. Pemutakhiran Peta Rencana pada Sistem Informasi Arsitektur PEMDI. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				manajemen, Penyelenggara, Data, Keamanan Siber, Teknologi Digital, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, Kepuasan Pengguna Layanan Digita Pemerintah	penyelenggaraan Pemerintah Digital (PEMDI) serta rumusan strategi pencapaian target nilai indeks Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) tahun 2026 <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan strategi pemutakhiran Sistem Informasi Arsitektur PEMDI. 	<ul style="list-style-type: none"> Penajaman indikator prioritas Pemerintah Digital (PEMDI) yang akan ditingkatkan dalam jangka pendek dan menengah. Pelaksanaan Audit TIK, dalam rangka penguatan tata kelola manajemen pemerintah digital. Pemutakhiran Sistem Informasi Arsitektur PEMDI pada layanan pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Layanan Digital Pemerintah dilakukan sebagai inovasi dan respon atas kebutuhan pengguna Layanan Digital Pemerintah Mengoptimalkan infrastruktur dan keamanan siber melalui peremajaan alat konfigurasi, penguatan tim CSIRT Pemutakhiran Sistem Informasi Arsitektur PEMDI pada layanan utama. 	
		Indeks Perencanaan	96	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Ranwal Renja 2027 dan Reviu Baseline berdasarkan kebutuhan atas Belanja Operasional (Belanja Barang dan Pegawai), Belanja Modal, Rincian Output Prioritas (mendukung PN), dan Rincian Output Usulan/Inisiatif Baru 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Revisi Renja 2026 sesuai dengan Pemutakhiran RKP 2026 Mengevaluasi dan melakukan pengendalian Pagu Anggaran Rincian Output pada Renja 2026 dan RKA-K/L 2026. Menyusun laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN 2026. Sinkronisasi Renja 2026 dengan Revisi DIPA 2026. Meneliti usulan Unit Kerja pada Renja KRISNA 2027 dengan Dokumen TOR dan RAB yang diusulkan berdasarkan Pagu Indikatif. Menyesuaikan Rancangan Renja 2027 dan RKA-K/L 2027 berdasarkan usulan TOR dan RAB. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi dan melakukan pengendalian Pagu Anggaran Rincian Output pada Renja 2026 dan RKA-K/L 2026. Menyusun laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN 2026. Sinkronisasi Renja 2026 dengan Revisi DIPA 2026. Menyesuaikan Rancangan Renja 2027 dan RKA-K/L 2027 dengan mengacu pada Pagu Anggaran. Meneliti kesesuaian redaksi RO pada Renja KRISNA 2027 serta kesesuaian target volume yang diusulkan. Melakukan penyesuaian pada RKA K/L 2027 dengan berdasarkan hasil penelitian atas Usulan Unit Kerja pada Renja KRISNA 2027 dengan Dokumen TOR dan RAB yang telah disesuaikan Pagu Anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi Pagu Anggaran Renja 2027 dengan RKA-K/L 2027. Persiapan penyusunan laporan hasil evaluasi tahunan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN 2026. Melakukan penyesuaian pada RKA K/L 2027 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran. Melakukan penyesuaian pada RKA K/L 2026 dan finalisasi Renja K/L 2027 berdasarkan perbaikan dokumen TOR dan RAB atas hasil reviu APIP.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Capaian Prioritas Nasional	100%	<ul style="list-style-type: none"> Mengawal pencapaian Rincian Output khususnya yang mendukung Prioritas Nasional melalui monitoring capaian kinerja tiap triwulan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan dan Evaluasi hasil capaian kinerja RO PN tahun 2025 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan RO PN tahun 2026 Monitoring capaian kinerja RO Triwulan I tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring capaian kinerja RO Triwulan II tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring capaian kinerja RO Triwulan III tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring capaian kinerja RO Triwulan IV tahun 2026 Menyusun Dokumen Rencana Aksi RO PN Tahun 2027
		Capaian Indikator Kinerja Utama	100%	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Dialog Kinerja Organisasi Optimalisasi TIM PKO 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana aksi pengawalan capaian IKU 2025 Pelaporan capaian kinerja 2024 Pelaksanaan Forum Dialog kinerja organisasi TW I Kickoff TIM PKO 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan capaian kinerja TW II Pemetaan strategi perbaikan yang dilakukan pada TW II Perhitungan Nilai PKO 2025 Pelaksanaan Dialog Kinerja TW II bersama Tim PKO 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan capaian kinerja TW III Pemetaan strategi perbaikan yang dilakukan pada TW III Pelaksanaan Dialog kinerja organisasi TW III bersama TIM PKO 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan capaian kinerja TW IV Pemetaan strategi perbaikan yang dilakukan pada TW IV Pelaksanaan Dialog kinerja organisasi TW IV bersama TIM PKO
		Nilai Kinerja Anggaran	91	<ul style="list-style-type: none"> Mengawal pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui monitoring capaian komponen penyusun NKA berupa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Monitoring Capaian Indikator kinerja sasaran strategis, capaian indikator kinerja program, dan capaian rincian output pada Triwulan I Tahun 2026 Monitoring efisiensi dan efektivitas penggunaan Standar Biaya Keluaran pada triwulan I Tahun 2026 Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk Monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan I Tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Capaian Indikator kinerja sasaran strategis, capaian indikator kinerja program, dan capaian rincian output pada Triwulan II Tahun 2026 Monitoring efisiensi dan efektivitas penggunaan Standar Biaya Keluaran pada triwulan II Tahun 2026 Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk Monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan II Tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Capaian Indikator kinerja sasaran strategis, capaian indikator kinerja program, dan capaian rincian output pada Triwulan III Tahun 2026 Monitoring efisiensi dan efektivitas penggunaan Standar Biaya Keluaran pada triwulan III Tahun 2026 Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk Monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan III Tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Capaian Indikator kinerja sasaran strategis, capaian indikator kinerja program, dan capaian rincian output pada Triwulan IV Tahun 2026 Monitoring efisiensi dan efektivitas penggunaan Standar Biaya Keluaran pada triwulan IV Tahun 2026 Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk Monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan IV Tahun 2026
2.	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular	80%	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Tingkat Input Material Sirkular. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan bersama KemenPPN/Bappenas dan K/L atas cascading Program Prioritas Ekonomi Sirkular dalam RPJMN 2025-2029. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi dengan KemenPPN/Bappenas terkait RAN-ES. Identifikasi kebijakan dan regulasi kebijakan Ekonomi Sirkular di K/L. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi terkait implementasi ekonomi sirkular dengan K/L, Pemda, dan pelaku usaha terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan evaluasi implementasi di K/L terkait. Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi kegiatan ES di K/L dan rekomendasi perbaikan untuk 2027.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	80%	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan (PPLP) 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan permasalahan terkait Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan (PPLP) Pembahasan bersama KemenPPPA dan K/L terkait atas cascading Program Prioritas Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan (PPLP) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait PPLP Pembahasan pedoman PUG 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait PPLP Internalisasi PUG dalam dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring evaluasi kebijakan terkait PPLP Pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan
3.	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti	90%	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan permasalahan Penyusunan dan pemutakhiran data terkait kebijakan lintas sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi kebijakan lintas sektoral Pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan
4.	Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja	100%	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi Renja dan Perjanjian Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kerangka faktor ekonomi yang akan digunakan dalam perencanaan program, anggaran dan kinerja Identifikasi Ruang lingkup koordinasi berdasarkan dokumen RPJMN Menyusun Matriks Penilaian Indikator Kinerja Reviu Usulan IKU 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan perjanjian kinerja, manual IKU dan rencana aksi Menyelaraskan Perjanjian kinerja dengan Rencana Kerja Identifikasi keselarasan IKU dan Rincian Output Merevisi Rencana Kerja Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Monitoring capaian rincian output 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Monitoring capaian rincian output Evaluasi kualitas perencanaan program, anggaran, dan kinerja
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	100%	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Revisi Renja 2026 sesuai dengan Pemutakhiran RKP 2026 Menyusun Ranwal Renja 2027 dan Reviu Baseline 2027 berdasarkan kebutuhan atas Belanja Operasional (Belanja Barang dan Pegawai), Belanja Modal, Rincian Output Prioritas (mendukung PN), dan Rincian Output Usulan/Inisiatif Baru 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Pengendalian Pagu Anggaran Rincian Output TW I pada Renja dan RKA-K/L TA 2026. Menyusun Renja K/L 2027 sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2027 Menyusun laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN. Sinkronisasi Renja dengan Revisi DIPA. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Pengendalian Pagu Anggaran Rincian Output pada Renja dan RKA-K/L TA 2026. Menyusun laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN semester I. Sinkronisasi Renja dengan Revisi DIPA per semester I. Melakukan penyesuaian pada RKA-K/L 2027 dengan berdasarkan hasil Reviu APIP 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan penyusunan laporan hasil evaluasi tahunan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN. Menyiapkan dokumen pendukung (apabila dibutuhkan) untuk penyesuaian Renja 2027 dan RKA-K/L 2027 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran. Melakukan penyesuaian pada Renja 2027 dan RKA-K/L 2027 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran.


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> Melakukan revisi POK setiap bulan pada tanggal 25 dan revisi DIPA setiap triwulan (apabila diperlukan). 	<ul style="list-style-type: none"> Meneliti dan mereviu usulan Unit Kerja pada Renja KRISNA 2027 dengan Dokumen TOR dan RAB yang diusulkan berdasarkan Pagu Indikatif 2027. Menyesuaikan Rancangan Renja 2027 dan RKA-K/L 2027 berdasarkan TOR dan RAB yang telah diteliti. Menyesuaikan Dokumen TOR dan RAB, serta Rancangan Renja dan RKA-K/L TA 2027 dengan mengacu pada Pagu Anggaran. Melakukan revisi POK setiap bulan pada tanggal 25 dan revisi DIPA setiap triwulan (apabila diperlukan). 	<p>atas Usulan Unit Kerja pada Renja KRISNA dan RKA-K/L SAKTI TA 2027 dengan Dokumen TOR dan RAB yang telah disesuaikan dari hasil reviu tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Revisi Renja TA 2026 dengan mengacu Rencana Strategi Kemenko Perekonomian 2025-2029 yang telah ditetapkan Melakukan revisi POK setiap bulan pada tanggal 25 dan revisi DIPA setiap triwulan (apabila diperlukan). 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi konsep RKA-K/L dan DIPA TA 2027. Menetapkan Renja K/L TA 2027. Melakukan revisi pemutakhiran revisi DIPA pada bulan November di tahun berjalan dan revisi POK maksimal pada tanggal 23 Desember di tahun berjalan.
		Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	100%	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Fasilitasi penguatan penyelesaian kerja sama dan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja tahun 2025 Penetapan konsep draf laporan kinerja TW I Identifikasi dokumen kinerja yang belum selaras dengan indikator kinerja unit kerja Rapat koordinasi awal pengelolaan kinerja dengan unit kerja Melaksanakan pendampingan penyusunan panduan kinerja dan kerja sama yang selaras dengan sasaran dan indikator kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring ketercapaian NKO perjanjian kinerja tahun 2025 TW I Penetapan konsep draf laporan kinerja TW II Evaluasi ketepatan dokumen pelaksanaan laporan kinerja TW I Koordinasi antar unit kerja dalam penguatan kerja sama dan kinerja Monitoring pelaksanaan kinerja dan kerja sama yang dilaksanakan oleh unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring ketercapaian NKO perjanjian kinerja tahun 2025 TW II Penetapan konsep draf laporan kinerja TW III Evaluasi ketepatan dokumen pelaksanaan laporan kinerja TW II Koordinasi antar unit kerja dalam penguatan kerja sama dan kinerja Monitoring pelaksanaan kinerja dan kerja sama yang dilaksanakan oleh unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring ketercapaian NKO perjanjian kinerja tahun 2025 TW III Penetapan konsep draf laporan kinerja TW IV dan laporan tahunan 2025 Evaluasi ketepatan dokumen pelaksanaan laporan kinerja TW III dan IV Koordinasi antar unit kerja dalam penguatan kerja sama dan kinerja Monitoring pelaksanaan kinerja dan kerja sama yang dilaksanakan oleh unit kerja Evaluasi efektivitas koordinasi penguatan kerja sama dan kinerja
		Persentase Penyelesaian	100%	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan standar keluaran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan standar keluaran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi standar keluaran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penerapan standar keluaran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan standar keluaran kebijakan berdasarkan hasil evaluasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Standar Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> Implementasi dan sosialisasi standar keluaran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi standar keluaran kebijakan 				
		Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	100%	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Penyediaan Data, meliputi : Satu Data Indonesia dan Informasi Geospasial Tematik. Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral. Peningkatan kualitas jaringan internet kabel dan Nirkabel. Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi. Optimalisasi pengelolaan Aplikasi Sistem elektronik. Penguatan Keamanan Sistem Informasi. Peningkatan Kapasitas SDM IT. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sumber data eksternal Menyusun Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral Menyusun strategi tanggap insiden siber Pengembangan Aplikasi Sistem Elektronik Monitoring Pemanfaatan Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Mitigasi risiko keamanan siber 	<ul style="list-style-type: none"> Rekonfigurasi perangkat jaringan internet Menyusun Identifikasi Kebutuhan Data Melakukan reuiv kegiatan statistik sektoral Menyiapkan Mekanisme system Help Desk Data dan sistem informasi Implementasi <i>Cloud Based Server</i> untuk <i>storage data</i> unit organisasi Melakukan evaluasi SOP dan/atau kebijakan penataan Data dan Layanan Sistem Informasi Memutakhirkan SOP dan/atau kebijakan penataan Data dan Layanan Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Kesadaran Keamanan Siber dan Perlindungan data Pribadi Meningkatkan kapasitas SDM digital pada bidang Data dan Manajemen Sistem Informasi. Asesmen performa dan keamanan jaringan internet Implementasi Integrasi Layanan Digital melalui Single Sign On (SSO). 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi pemanfaatan data dan sistem informasi. Menyampaikan laporan hasil evaluasi. Melakukan evaluasi implementasi Sistem informasi dalam konteks pemerintah digital. Menyusun laporan hasil evaluasi Data dan Sistem Informasi Tahunan. 	
5.	Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan Program dan Anggaran, layanan data sistem dan informasi, layanan analisis kebijakan dan layanan fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan Melakukan evaluasi layanan kepuasan tahun 2025 untuk penyempurnaan tahun 2026 Internalisasi penguatan pelayanan melalui penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan draft survey Semester I Kepuasan layanan Sekretariat Penyusunan Laporan Hasil Kepuasan Layanan Sekretariat Semester II Penguatan infrastruktur layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan Melakukan evaluasi layanan kepuasan Semester I untuk penyempurnaan di akhir Semester II tahun 2026 Melaksanakan penyusunan laporan kepuasan dan rekomendasi perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan Penyusunan draft survey Semester II Kepuasan layanan Sekretariat Penyusunan Laporan Hasil Kepuasan Layanan Sekretariat Semester II Penguatan infrastruktur layanan 	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				penguatan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana layanan pada TW I 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan 	layanan dan Analisis trend kepuasan dari tahun ke tahun	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi layanan kepuasan Semester II untuk penyempurnaan di tahun berikutnya
6.	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	92%	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dalam pelaksanaan rencana aksi RB General 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB TW I Penyusunan dan penetapan PK, Rencana Aksi, dan Manual IKU Penyusunan Lapkin TW I Penyusunan Renja 2026 Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW I Monev realisasi anggaran Penyusunan RPD Monev pencatatan SIRUP TW I Monev pemanfaatan aplikasi E-Kinerja BKN TW I Penyusunan bahan LOM TW I Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB TW II Pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP TW II Penyusunan Laporan Kinerja TW II Penyusunan revisi Renja 2025 TW II Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW II Monev realisasi anggaran Penyusunan RPD Penyusunan bahan LOM TW II Pemenuhan dokumen Pendukung pemeriksaan keuangan BPK TW II Koordinasi hasil rekomendasi BPK Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal (TW II) Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK Koordinasi pengusulan agen perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Aksi RB General 2025 TW III Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB TW III Penyusunan dan penetapan tim kerja TW III Penyusunan matriks manajemen risiko Penyusunan Laporan Kinerja TW III Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025 TW III Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW III Monev realisasi anggaran Penyusunan RPD Penyusunan bahan LOM TW III Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB TW IV Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW IV Monev realisasi anggaran Penyusunan RPD Implementasi LLAT Monev pencatatan SIRUP Pengisian SIRUP Penyusunan usulan formasi ASN Penyusunan bahan LOM TW IV Koordinasi hasil rekomendasi BPK Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK
		Nilai AKIP Sekretariat	80	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi tindak lanjut evaluasi AKIP Inspektorat 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan matriks tindak lanjut atas rekomendasi LHE AKIP 2025 dari inspektorat Penyusunan Perjanjian Kinerja dan lampiran kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja TW II di lingkungan Sekretariat Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja TW II 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja TW III di lingkungan Sekretariat Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja TW III 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 Penyusunan Laporan Kinerja TW IV di lingkungan Sekretariat Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja TW IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					tahun 2026 pada Eselon I dan II • Penyusunan Laporan Kinerja TW I • Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja TW I • Monitoring capaian NKO TW I • Penggunaan ekon.go untuk optimalisasi kinerja dalam pengukuran dan pelaporan	• Monitoring capaian NKO TW II • Penggunaan ekon.go untuk optimalisasi kinerja dalam pengukuran dan pelaporan • Monitoring implementasi matriks tindak lanjut atas rekomendasi LHE AKIP 2025 dari • Pemenuhan Bukti Dukung AKIP Sekretariat	• Monitoring capaian NKO TW III • Penggunaan ekon.go untuk optimalisasi kinerja dalam pengukuran dan pelaporan • Pelaksanaan Evaluasi AKIP Sekretariat	• Monitoring capaian NKO TW IV • Penggunaan ekon.go untuk optimalisasi kinerja dalam pengukuran dan pelaporan

Jakarta, 30 Januari 2026
 Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama


 Evita Manthovani

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 1.1

Sasaran Strategis

Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Deskripsi Sasaran Strategis

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, analisis dan harmonisasi kebijakan, manajemen kinerja, pengelolaan data perekonomian, sistem teknologi informasi, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator. Melalui sasaran strategis ini diharapkan Biro MKKS mampu menjalankan system pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip good governance yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Deskripsi IKU

Definisi

Permen PAN-RB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan payung hukum pelaksanaan evaluasi AKIP Kementerian/Lembaga. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi sistem AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi ini menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang akan menjadi pedoman evaluasi bagi Kementerian Perekonomian untuk tahun berikutnya

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah nilai perwujudan kewajiban Kementerian Koordinator Bidang] Perekonomian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan tahunan. Penilaian AKIP meliputi empat komponen, yaitu :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diterima setelah pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahunnya di awal tahun.

Formula

Nilai AKIP dikeluarkan setiap tahun melalui Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB. Berikut merupakan komponen penilaian yang menjadi rujukan nilai LHE dengan pembobotan sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Sub Komponen 1 (Keberadaan) 20%	Sub Komponen 2 (Kualitas) 30%	Sub Komponen 3 (Keberadaan) 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP :

- AA (Skor >90–100)** : Sangat Memuaskan
- A (Skor >80–90)** : Memuaskan
- BB (Skor >70–80)** : Sangat Baik
- B (Skor >60–70)** : Baik
- CC (Skor >50–60)** : Cukup
- C (Skor >30–50)** : Kurang
- D (Skor 0–30)** : Sangat Kurang

Tujuan
Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Satuan Pengukuran

Unit/Pihak Penyedia Data

Pejabat Penanggung Jawab Data

Sumber Data

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas IKU

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading IKU

Metode Cascading

Polarisasi IKU

Periode Pelaporan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	73,5	74,32	74,5
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 1.2

Sasaran Strategis

Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Deskripsi Sasaran Strategis

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, analisis dan harmonisasi kebijakan, manajemen kinerja, pengelolaan data perekonomian, sistem teknologi informasi, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator. Melalui sasaran strategis ini diharapkan Biro MKKS mampu menjalankan system pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip good governance yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indeks Kualitas Kebijakan

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pilar tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian perwujudan asta cita ke 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi serta penyelundupan. Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan Pemerintah terutama dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence based*). Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan. Indikator indeks kualitas kebijakan juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas proses penyusunan, koordinasi, dan implementasi kebijakan publik yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun kriteria pengukuran IKK yaitu dilakukan setiap tahun, ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, kebijakan pembangunan strategis memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas, dan kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran. Instrumen pengukuran menggunakan 11 pertanyaan. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Formula

Penilaian IKK Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Kepala LAN No. 8/K.1/HKM.02.3/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Adapun penilaian dilakukan terhadap 3 kebijakan di masing-masing instansi setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari Penilaian Mandiri (*self assessment*), proses verifikasi oleh LAN, proses umpan balik (*feed back*) dan perbaikan/penyempurnaan, serta penetapan hasil penilaian akhir. Instrumen pengukuran IKK terdiri dari 1 Profil dan 5 Dimensi dengan rincian sebagai berikut:

1. Profil dengan bobot 10%
2. Perencanaan Kebijakan dengan bobot 20%
3. Implementasi Kebijakan dengan bobot 25%
4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan dengan bobot 30%
5. Transparansi dan Partisipasi Publik dengan bobot 15%

Nilai IKK = Indeks komposit tertimbang dari 5 Instrumen Pengukuran

Kategori Penilaian: <50,00 (kurang); 50,00 – 64,99 (cukup); 65,00-79,99 (baik); 80,00-90,99 (sangat baik); 91,00-100 (unggul)

Tujuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas proses penyusunan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Lembaga Administrasi Negara

Pejabat Penanggung Jawab Data

Lembaga Administrasi Negara

Sumber Data

Lembaga Administrasi Negara

Tingkat Kendali IKU	<input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	98,77%		92
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 1.3

Sasaran Strategis

Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Deskripsi Sasaran Strategis

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, analisis dan harmonisasi kebijakan, manajemen kinerja, pengelolaan data perekonomian, sistem teknologi informasi, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator. Melalui sasaran strategis ini diharapkan Biro MKKS mampu menjalankan system pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip good governance yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 7 aspek, yaitu : (1) Aspek Tata Kelola dan Manajemen; (2) Aspek Penyelenggara; (3) Aspek Data; (4) Aspek Keamanan Pemerintah Digital; (5) Aspek Teknologi Digital; (6) Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah; (7) Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Kemenpan RB) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini

Formula

Hasil penilaian dari Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) didapatkan oleh evaluator dari Kemenpan RB yang dilakukan setiap tahun. Ukuran tingkat kematangan:

- Level 1 (*Initiate/Kurang*) diberikan nilai 1,00 s.d. < 1,50
- Level 2 (*Emerging/Cukup*) diberikan nilai $\geq 1,50$ s.d. < 2,50
- Level 3 (*Developing/Baik*) diberikan nilai $\geq 2,50$ s.d. < 3,50
- Level 4 (*Embedded/Sangat Baik*) diberikan nilai $\geq 3,50$ s.d. < 4,00
- Level 5 (*Leading/Memuaskan*) diberikan nilai $\geq 4,00$ s.d. 5,00

Perhitungan nilai tingkat kematangan indeks Pemerintah Digital (Pemdi)

Nilai Indeks :

- Nilai indeks Indikator, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan Pemdi pada suatu indikator, dihitung berdasarkan perhitungan dari perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator
- Nilai indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan Pemdi pada aspek tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan perkalian antara nilai indeks indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut
- Nilai indeks Pemdi, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan Pemdi secara keseluruhan, dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek

Bobot Aspek:

Aspek 1 – Aspek Tata Kelola dan Manajemen: 10%
Aspek 2 – Aspek Penyelenggara : 10%
Aspek 3 – Aspek Data: 15%
Aspek 4 – Aspek Keamanan Pemerintah Digital: 15%
Aspek 5 – Aspek Teknologi Digital: 10%
Aspek 6 – Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah: 15%
Aspek 7 – Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah: 25%
Total Bobot : 100%

Tujuan

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di Kementerian, dan mewujudkan pelayanan Kementerian yang berkualitas dan terpercaya serta mewujudkan layanan pemerintah digital yang terpadu.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian PAN-RB

Pejabat Penanggung Jawab Data	Kementerian PAN-RB
Sumber Data	Kementerian PAN-RB
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	1,7
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Periode Pelaporan

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100%	100%	96
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 1.5

Sasaran Strategis

Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Deskripsi Sasaran Strategis

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, analisis dan harmonisasi kebijakan, manajemen kinerja, pengelolaan data perekonomian, sistem teknologi informasi, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator. Melalui sasaran strategis ini diharapkan Biro MKKS mampu menjalankan system pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip good governance yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Prioritas Nasional

Deskripsi IKU

Definisi

Indikator Kinerja Utama Capaian Prioritas Nasional merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana Kemenko Perekonomian berkontribusi secara langsung dalam mengoordinasikan dan mengawal program-program yang mendukung Prioritas Nasional sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis nasional.

IKU ini menilai efektivitas Kemenko Perekonomian dalam memastikan K/L selaras dan sinkron atas kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap target-target pembangunan nasional. Oleh karena itu, IKU ini juga menjadi refleksi dari peran strategis Kemenko Perekonomian dalam mewujudkan keterpaduan lintas sektor dan mengawal arah kebijakan ekonomi nasional

Formula

Penilaian capaian prioritas nasional mengacu pada metodologi evaluasi yang digunakan oleh Kemenpan RB melalui lembar kerja evaluasi. Rumusnya :

$$\% = \frac{\text{Jumlah Target RO terkait PN yang tercapai}}{\text{Jumlah Target RO terkait PN yang diampu}} \times 100$$

Adapun RO terkait Prioritas Nasional yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi :

- Rekomendasi kebijakan pengembangan industri pada sektor padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor.
- Rekomendasi kebijakan terkait penurunan biaya logistik nasional.
- Rekomendasi kebijakan mengenai proses akses Indonesia ke OECD.
- Rekomendasi kebijakan dalam penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan ekonomi digital nasional periode 2025–2030.
- Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan inklusi keuangan.
- Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
- Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi.
- Rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- Rekomendasi kebijakan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.
- Rekomendasi kebijakan pelaksanaan Cipta Kerja.
- Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi di KEK Arun Lhokseumawe.
- Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi di KEK Galang Batang.
- Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi di KEK Gresik.
- Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi di KEK Sei Mangkei.
- Pelayanan investasi oleh Administrator KEK Galang Batang.
- Pelayanan investasi oleh Administrator KEK Sei Mangkei.
- Pelayanan investasi oleh Administrator KEK Gresik.
- Pelayanan investasi oleh Administrator KEK Arun Lhokseumawe.
- Rekomendasi kebijakan penguatan daya saing destinasi pariwisata berkelanjutan.
- Rekomendasi kebijakan penguatan industri besi dan baja.
- Rekomendasi kebijakan pengembangan industri semikonduktor.
- Rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi nikel.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa RO yang mendukung prioritas nasional yang diampu Kemenko Perekonomian telah dikawal dengan baik

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Kemenko Perekonomian, KemenPPN/Bappenas, Kemenpan RB
Pejabat Penanggung Jawab Data	Kemenko Perekonomian
Sumber Data	Kemenko Perekonomian
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (..) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100%	100%	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 1.6

Sasaran Strategis

Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Deskripsi Sasaran Strategis

Birokrasi yang berkualitas terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan yang diimplementasikan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, analisis dan harmonisasi kebijakan, manajemen kinerja, pengelolaan data perekonomian, sistem teknologi informasi, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator. Melalui sasaran strategis ini diharapkan Biro MKKS mampu menjalankan system pemerintahan yang dikoordinasikan sesuai dengan prinsip good governance yang selanjutnya dapat mendorong capaian kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama

Deskripsi IKU

Definisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan IKU mengacu pada dokumen perencanaan strategis serta perjanjian kinerja. IKU dirancang untuk mencerminkan hasil strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun IKU yang digunakan sebagai indikator penilaian meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Biaya logistik
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
4. Rasio PDB industri pengolahan
5. Devisa pariwisata
6. Rasio PDB pariwisata
7. Indeks ketahanan energi
8. Indeks daya saing digital global
9. Tingkat inflasi
10. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal
11. Tingkat pengangguran terbuka
12. Indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian
13. Indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perekonomian
14. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian

Capaian IKU dihitung berdasarkan realisasi terhadap target tahunan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, akurasi, serta konsistensi data. Penilaian capaian IKU mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta kualitas koordinasi lintas sektor yang menjadi mandat utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Formula

Penilaian capaian IKU mengacu pada metodologi evaluasi yang digunakan oleh Kemen PAN-RB melalui lembar kerja evaluasi. Rumusnya :

$$\% = \frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah total IKU yang dinilai}} \times 100$$

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur capaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian PAN-RB

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Sumber Data	Laporan Hasil Manajemen Kinerja dan Kerja Sama		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(..) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(....) Triwulanan	(...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100%	100%	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Metode Cascading

Direct Indirect

Polarisasi IKU

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	91
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 2.1

Sasaran Strategis

Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran untuk menjalankan penugasan khusus yang bersifat lintas unit. Sasaran strategis ini menegaskan peran khusus Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengemban *special mission* terhadap isu-isu strategis di bidang perekonomian. Dukungan pengambilan kebijakan meliputi pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian isu-isu strategis dibidang perekonomian terutama yang bersifat *crosscutting*. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

1. Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan
3. Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan tingkat input material sirkular dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

- Tahap 3, bobot 33,3, %
Tahap 2, bobot 33,3, %
Tahap 1, bobot 33,3, %

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait tingkat input material sirkular diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama : Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait tingkat input material sirkular, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain :

1. Undangan rapat dan daftar hadir;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua : Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

1. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga : Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
 2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
 3. Kertas Kerja Kebijakan;
 4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.
- Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait tingkat input material sirkular

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Keluaran yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Keluaran yang ditargetkan}} \times 33,3\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Keluaran yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Keluaran yang ditargetkan}} \times 33,3\%$$

3. Perhitungan Realsiasi Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Keluaran yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Keluaran yang ditargetkan}} \times 33,3\%$$

4. Nilai Akhir Persentase Penyelesaian Kebijakan

$$\% \text{Penyelesaian SKP} = \text{Tahapan Pertama} + \text{Tahapan Kedua} + \text{Tahapan Ketiga}$$

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas Kemenko Perekonomian dalam melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Tingkat Input Material Sirkular

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Sumber Data

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact (X) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (..) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	80%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 2.2

Sasaran Strategis

Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran untuk menjalankan penugasan khusus yang bersifat lintas unit. Sasaran strategis ini menegaskan peran khusus Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengemban *special mission* terhadap isu-isu strategis di bidang perekonomian. Dukungan pengambilan kebijakan meliputi pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian isu-isu strategis dibidang perekonomian terutama yang bersifat *crosscutting*. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

1. Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan
3. Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan tingkat input material sirkular dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

Tahap 3, bobot 33,3, %

Tahap 2, bobot 33,3, %

Tahap 1, bobot 33,3, %

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait tingkat input material sirkular diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama : Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait tingkat input material sirkular, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain :

1. Undangan rapat dan daftar hadir;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua : Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

1. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga : Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;
4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait tingkat input material sirkular.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama
 Tahapan Pertama = $\frac{\text{Jumlah Keluaran yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Keluaran yang ditargetkan}} \times 33,3\%$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua
 Tahapan Pertama = $\frac{\text{Jumlah Keluaran yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Keluaran yang ditargetkan}} \times 33,3\%$

3. Perhitungan Realsiasi Tahapan Ketiga
 Tahapan Pertama = $\frac{\text{Jumlah Keluaran yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Keluaran yang ditargetkan}} \times 33,3\%$

4. Nilai Akhir Persentase Penyelesaian Kebijakan
 $\% \text{Penyelesaian SKP} = \text{Tahapan Pertama} + \text{Tahapan Kedua} + \text{Tahapan Ketiga}$

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas Kemenko Perekonomian dalam melakukan sinkronis, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Pejabat Penanggung Jawab Data	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Sumber Data	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (..) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (..) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (..) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	80%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Tingkat Validitas IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	90%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Jenis Cascading IKU	<input type="checkbox"/> Cascading Peta	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Metode Cascading

<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect
---------------------------------	--

Polarisasi IKU

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

Periode Pelaporan

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Polarisasi IKU

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	100%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 5.1

Sasaran Strategis

Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Layanan prima dalam dukungan manajemen kinerja dan kerja sama yang berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang memiliki tugas fungsi sebagai pendukung pada level Sekretaris Kementerian. Layanan prima dalam dukungan manajemen yang berkualitas harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar unit kerja bukan hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan dukungan manajemen yang berkualitas, akan mempermudah unit kerja untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diharapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Deskripsi IKU

Definisi

Indikator kepuasan layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama digunakan untuk menilai tingkat kepuasan terhadap koordinasi dan dukungan yang diberikan. Penilaian ini didasarkan pada lima dimensi kualitas layanan, yaitu:

1. **Ketanggapan (Responsiveness)**
Menggambarkan kemampuan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan, atau kebutuhan layanan.
2. **Keandalan (Reliability)**
Menilai sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar yang telah ditetapkan.
3. **Sarana dan Prasarana (Tangible)**
Menilai ketersediaan serta kualitas fasilitas dan tampilan lingkungan kerja yang mendukung pelayanan.
4. **Jaminan (Assurance)**
Mengukur kompetensi, kemampuan, dan tingkat kepercayaan pengguna terhadap petugas dalam memberikan layanan.
5. **Empati (Empathy)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal serta pendekatan yang manusiawi dalam pelayanan.

Kelima aspek tersebut dirata-ratakan untuk menghasilkan indeks kepuasan layanan yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Formula

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Layanan Biro MKKS diukur melalui Survei Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh Biro MKKS. Survei ini mencakup pertanyaan terkait layanan yang diberikan oleh Biro MKKS kepada Deputi. Responden dipilih secara acak dari unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di luar Biro MKKS.

$$\text{Rumus Perhitungan} = \frac{\text{Jumlah Rerata Jawaban dari Masing-Masing Item Survey}}{\text{Jumlah item Survey}} \times 50\%$$

Nilai indeks diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori penilaian sebagai berikut:

- **Sangat Puas (4):** rentang nilai 3,51 – 4,00
- **Puas (3):** rentang nilai 3,01 – 3,50
- **Tidak Puas (2):** rentang nilai 2,51 – 3,00
- **Sangat Tidak Puas (1):** rentang nilai < 2,50

Tujuan

Memberikan Gambaran tingkat kepuasan terhadap layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Kemenko Perekonomian

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	Laporan Kepuasan Layanan Sekretariat
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	92%
s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : S 6.2

Sasaran Strategis

Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Baik

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya tata kelola Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang baik merupakan sasaran strategis dalam Sekretariat (Eselon I). Sasaran ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses bisnis serta sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang efektif di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Melalui sasaran strategis ini, Biro MKKS diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh unit kerja menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam setiap proses kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai SAKIP Sekretariat

Deskripsi IKU

Definisi
Nilai SAKIP Sekretariat dikeluarkan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik
Formula
Nilai SAKIP Sekretariat ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen yaitu : Nilai SAKIP : Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal
Tujuan
Untuk mengukur sejauh mana Sekretariat telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil

Satuan Pengukuran

Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data

Inspektorat

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(...) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (..) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	80

s.d. Triwulan I	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-